

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan dunia keuangan dewasa ini memberikan banyak pilihan kepada masyarakat didalam membuat keputusan-keputusan keuangan, berbagai produk-produk keuangan baru semakin variatif dan menuntut orang-orang untuk memahaminya apabila mau memanfaatkannya, literasi keuangan semakin menjadi hal yang signifikan diperlukan karena dalam literasi keuangan tersedia berbagai macam cara serta pengetahuan untuk menjadikan seseorang cerdas dalam mengelola keuangannya. Menurut Muliaman D. Hadad kurangnya literasi keuangan membawa dampak pada *consumer behaviour* yang buruk, hal ini membawa konsumen pada paparan kejahatan keuangan seperti investasi bodong (Aprillia, 2017).

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confididence*) konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik, dengan definisi seperti ini, masyarakat diberikan bekal edukasi yang memadai dan mencukupi untuk mengambil keputusan keuangan dengan lebih baik, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan memberikan manfaat yang lebih besar. Secara umum literasi keuangan dipakai sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan beserta produk dan jasa keuangan yang tersedia. Masyarakat bisa memilih produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengetahui dengan benar manfaat dan risikonya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan (Sugiarto, 2013).

Kualitas literasi keuangan masyarakat memiliki peran strategis, banyaknya kasus investasi bodong di masyarakat, karena ketidaktahuan masyarakat tentang jasa keuangan mana yang resmi dan tidak. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan konsumen. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, OJK berkewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Literasi keuangan merupakan salah satu fokus kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan dalam dekade terakhir ini. Pada tanggal 19 November 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) meluncurkan program Strategi Nasional Literasi Keuangan. Misi dari strategi nasional literasi keuangan adalah melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas. Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh OJK. Hasil survei yang dilakukan OJK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah, indeks literasi keuangan sebesar 21,84%. Hasil survei menjadi masukan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang di dalamnya juga terdapat aspek inklusi keuangan, yang menjadi pedoman bagi OJK dan industri jasa keuangan dalam melaksanakan kegiatan sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan literasi keuangan salah satunya adalah dengan edukasi pada masyarakat.

Jika pada tahun 2013 OJK melakukan survei nasional terhadap 8.000 responden yang tersebar di 40 wilayah pada 20 provinsi, maka tahun 2016 OJK kembali melakukan survei terhadap 9680 responden yang berada di 34 propinsi dan 64 kota /kabupaten, maka survei tahun 2016, menunjukkan adanya peningkatan tingkat literasi keuangan dari 21,84% menjadi 29,66% (OJK: Hasil Survei Literasi Keuangan 2016). Harapannya, dengan tingkat literasi keuangan masyarakat yang meningkat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal. Peningkatan ini tak lepas dari usaha OJK dalam melakukan edukasi di masyarakat. Tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan buku Seri Literasi Keuangan Indonesia : Perencanaan Keuangan Ibu Rumah Tangga. Ibu Rumah tangga menjadi sasaran edukasi literasi keuangan, tidak hanya menyasar ibu-ibu rumah tangga dan UMKM, OJK juga merangkul dunia pendidikan. Kusumaningtuti (2016), seorang anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dalam suatu sambutan menyatakan bahwa guna menyikapi globalisasi dalam sistem keuangan serta inovasi finansial yang menciptakan kompleksitas produk dan layanan keuangan, diperlukan generasi yang memiliki pemahaman, keterampilan dan keyakinan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini penting karena bukti empiris menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. OJK

telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis. Salah satu pilar dalam SNLKI tersebut adalah penyusunan dan penyediaan materi literasi keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal. OJK bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Industri Jasa Keuangan telah menyusun buku literasi keuangan “Mengenal Jasa Keuangan” untuk tingkat SD (kelas IV dan V), serta buku “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” untuk tingkat SMP dan tingkat SMA (kelas X). Bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, OJK juga berusaha mendekatkan mahasiswa dengan industri jasa keuangan melalui buku literasi keuangan untuk Perguruan Tinggi.

Edukasi Literasi keuangan melalui dunia pendidikan tidak lepas dari peran serta guru-guru dan dosen. Guru dan dosen menjadi ujung tombak didalam memberikan edukasi kepada peserta didik (siswa dan mahasiswa), harapannya semakin dini masyarakat diperkenalkan dengan literasi keuangan. Upaya OJK meningkatkan literasi keuangan di dunia pendidikan didukung pula oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24/2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Aturan itu menetapkan pemahaman mengenai lembaga jasa keuangan dan OJK sebagai cakupan kompetensi dasar tingkat SMA (Edukasi Konsumen Maret 2017). Selain membangun kerjasama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, OJK juga membangun kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, bersama dengan berbagai universitas dan juga industri jasa keuangan dalam menyusun materi edukasi keuangan melalui perguruan tinggi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku Seri Literasi Keuangan tingkat Perguruan Tinggi sebagai bentuk implementasi dari Strategi Nasional .Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Penyusunan buku berpedoman pada ketentuan dan teori yang berlaku di masing-masing sektor jasa keuangan, standar penyampaian materi pada buku-buku modul kuliah yang ada saat ini, serta disesuaikan dengan aplikasi pemanfaatannya di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendorong pemanfaatannya OJK berkoordinasi dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Mantan Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad mengatakan upaya yang ditempuh oleh OJK ini guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat (<http://finansial.bisnis.com/read/20160823/90/577511/ojk-luncurkan-buku-literasi-keuangan-tingkat-perguruan-tinggi>). Pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui perguruan tinggi tidak terlepas dari peran dosen. Dosen juga diharapkan memiliki tingkat literasi keuangan yang juga cukup baik. Selama ini belum banyak penelitian

mengenai tingkat literasi keuangan pada dosen-dosen perguruan tinggi, untuk itu penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi keuangan dosen-dosen perguruan tinggi. Adapun dalam penelitian ini mengacu pada penelitian *pilot project* “*Developing an Indonesian Financial Literacy Index*” yang merupakan kerja sama antara DEFINIT SEADI (*Support for Economic Analysis Development in Indonesia*), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengembangkan metodologi untuk mengukur tingkat literasi keuangan rumah tangga di Indonesia.

1.2 Perumusan masalah

- a. Bagaimana *Financial Literacy Index* (tingkat literasi keuangan) dosen-dosen di Palembang?
- b. Bagaimana distribusi *basic financial literacy index* dan *advanced financial index* berdasarkan gender, usia, penghasilan perbulan, pendidikan, asal perguruan tinggi, dan fakultas?
- c. Bagaimana distribusi *basic financial literacy index* dan *advanced financial index* berdasarkan kepemilikan produk keuangan?